



## “Menemukan Indonesia dalam perbedaan”

### Hak asasi sebagai bahasa perdamaian anak muda

#### 1. LATAR BELAKANG

Usainya pemilihan Presiden 2009 yang berlangsung beberapa saat yang lalu menandai dimulainya babak pemerintahan baru untuk lima tahun mendatang. Momentum ini sesungguhnya bertepatan dengan satu dekade ‘reformasi’ yang digulirkan dengan adanya transisi politik di tahun 1998. Transisi politik ini pula yang mengawali beberapa percepatan institusionalisasi hak asasi di tingkat domestik, baik melalui proses ratifikasi ataupun adopsi diam-diam instrumen hak asasi ke dalam ketentuan perundangan di tingkat nasional.

Transisi politik yang kemudian populer dengan jargon reformasi itu tak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan anak muda. Tak dapat dipungkiri, proses transisi politik tersebut didahului oleh serangkaian aksi yang melibatkan anak muda, mulai dari rangkaian demonstrasi, mobilisasi keprihatinan melalui senat-senat mahasiswa, pembentukan tim relawan dan sebagainya. Perubahan ini diikuti oleh perubahan sistem electoral yang diharapkan juga membuka ruang lebih besar bagi orang muda untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik baik ditingkat pusat dan daerah. Satu ruang penting yang terbuka melalui momentum ini adalah kesempatan untuk mendialogkan kembali tatanan dan makna menjadi Indonesia. Melaluinya, gagasan atas identitas Indonesia dan arah pengembangan tata kelola negara sebagai suatu ‘nation’ dapat diperbincangkan.

Dalam konteks inilah hak asasi manusia diharapkan dapat menjadi suatu bahasa bersama, dalam memperbincangkan tata negara Indonesia paska 1998. Selain itu, hak asasi juga telah diakui sebagai salah satu pilar penting pembentukan demokrasi paska 1998. Prinsip dan norma hak asasi memungkinkan terjadinya dialog dalam keberagaman, suatu ciri khas masyarakat yang multicultural.

Beberapa perkembangan yang cukup berarti dalam institusionalisasi hak asasi, khususnya di tingkat normative terjadi dalam periode ini. Diratifikasinya berbagai instrument HAM, diberlakukannya system multi partai dan desentralisasi, adanya berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta dilaksanakannya pemilihan umum yang melibatkan banyak masyarakat Indonesia sedikit banyak telah memberikan harapan akan membaiknya perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, beberapa langkah integrasi dalam kebijakan pembangunan telah juga ditempuh, seperti penyusunan Rencana aksi Nasional Hak Asasi manusia, pembentukan direktorat hak asasi manusia, pembentukan unit-unit kerja hak asasi manusia di lingkungan birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Akan tetapi, keberhasilan memperkuat jaminan normatif perlindungan hak asasi tersebut belum dapat dijadikan ukuran sukses yang memadai dalam perlindungan HAM di Indonesia. Jaminan tekstual tersebut belum dapat sepenuhnya menjadi realitas



konkrit bagi masyarakat. Belum diselesaikannya pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dibatakannya UU No.27 tahun 2004 tentang KKR, tidak adanya penyelesaian secara komprehensif dalam kasus Lapindo Brantas, diundangkannya berbagai UU yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga Negara (UU Pornografi, UU ITE) dan tidak berperspektif melindungi ekonomi warga Negara (UU Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan, UU Mineral, Energi dan Batubara), kenaikan harga BBM yang drastis, serta semakin lemahnya akses rakyat terhadap kebutuhan-kebutuhan primer, merupakan sedikit contoh problem riil hak asasi manusia pada masa pemerintahan SBY periode lalu.

Demokrasi multi partai, dan otonomi daerah yang sebelumnya diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas ternyata hanya menguntungkan golongan kepentingan politik elit baik di tingkat pusat maupun daerah. Bukannya melahirkan kebijakan yang aspiratif bagi masyarakat, para pembuat kebijakan justru membuat kebijakan yang merepresi hak untuk berekspresi, memarginalkan perempuan, dan melemahkan perekonomian rakyat.

Lebih jauh, penguatan kerangka normative perlindungan hak asasi ternyata tidak berbanding lurus dengan meningkatnya peran dan partisipasi anak muda. Anak muda masih terus terisolasi dan teralienasi dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Sebaliknya berbagai kegiatan dan program justru hanya menjadikan anak muda lebih sebagai obyek dan sasaran daripada sebagai subyek dan rekan dalam mengembangkan tatanan kenegaraan yang lebih baik.

Berbagai kajian yang ada semakin menguatkan kecenderungan ini, sebagai contoh, anak muda masih terus menjadi sasaran dan target perolehan suara dalam pemilu meskipun partai-partai sangat minim memberikan alokasi dan program khusus bagi anak muda.<sup>1</sup> Kelompok-kelompok berbasis agama juga terus menjadikan anak muda sebagai kelompok target dalam pengembangan gagasan, seperti yang muncul dalam rangkaian peristiwa pengeboman baru-baru ini.

Keprihatinan ini akan semakin besar apabila merujuk hasil kajian empat lembaga di tahun 2004 yang menemukan tingginya tingkat intoleransi di kalangan anak muda.<sup>2</sup> Kajian tersebut antara lain mengungkapkan tingginya tingkat intoleransi anak muda terhadap kelompok/orang lain yang berbeda keyakinan. Kajian lain yang dilansir satu harian Nasional muncul baru-baru ini justru menunjukkan bahwa anak muda cenderung bersifat apolitis dan berorientasi pada keamanan finansial. Kedua kajian

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data BPS, jumlah pemilih muda ( baik pemilih pemula maupun pemilih muda dibawah 30 tahun) sebanyak 42,1% ;( lihat situs <http://perubahanuntukrakyat.com/2009/03/24/pemilih-muda-dan-perubahan/> ),

<sup>2</sup> Kajian tersebut antara lain menyebutkan 55% setuju hukum rajam bagi pezina; 24,8% keberatan jika orang Kristen mengajar di sekolah negeri; 40,8% responden Muslim keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar tempat tinggalnya; dan sebanyak 49,9% keberatan jika orang Kristen membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya (diunduh dari <http://islamlib.com/id/artikel/optimisme-demokrasi-ala-islam-indonesia/> )



tersebut secara jelas mencerminkan masih jauhnya perbincangan mengenai pentingnya hak asasi dari kelompok muda.

Dengan mempertimbangkan seluruh hal tersebut diatas, jelas terlihat peran dan posisi strategis kelompok muda bagi keberhasilan mengusung hak asasi sebagai bahasa bersama dalam bernegara. Realitas ini meninggalkan pekerjaan rumah yang berat bagi pemajuan hak asasi, karena tanpa peran kelompok muda, upaya mewujudkan hak asasi sebagai suatu bahasa bersama dalam mengembangkan demokrasi akan semakin sulit terealisasi. Terlebih, kelompok muda inilah yang dalam beberapa tahun kedepan akan menduduki jabatan-jabatan publik dan lembaga-lembaga politik yang berperan dalam merumuskan dan mewarnai demokrasi 'ala' Indonesia.

Oleh karena itu, momentum hari Hak Asasi di tahun 2009 ini juga menjadi momentum penting untuk kembali menghadirkan dan mempermosikan hak asasi pada kelompok muda. Upaya ini memerlukan pendekatan yang khusus yang sesuai dengan karakteristik khusus yang melekat pada kelompok ini. Oleh karena itu, upaya membawa perbincangan hak asasi kepada kelompok muda ini ditempuh dengan memadukan sifat kegembiraan, ringan dan menghibur.

## 2. Kegiatan

Dalam rangka melakukan hal tersebut, **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)** berencana untuk mengadakan rangkaian kegiatan berupa:

1. Kompetisi Debate bagi mahasiswa:  
Kompetisi ini bertujuan untuk melakukan kampanye hak asasi di kalangan muda. Topik topik hak asasi yang dipilih untuk kompetisi debat diharapkan dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih dekat anak-anak muda terhadap masalah hak asasi yang digeluti ELSAM secara khusus dan persoalan hak asasi manusia secara umum.
2. Seminar dan Diskusi Panel dengan tema " **Anak Muda bicara agenda Hak Asasi : Membaca Peluang dan Tantangan Pemajuan HAM paska Pemilu paska 2009**

Seminar dan panel ini ditujukan untuk mendiskusikan pandangan dan keprihatian kelompok muda atas berbagai persoalan hak asasi yang penting. Masalah-masalah seperti hilangnya ingatan institusional atas kekerasan di masa lalu, tantangan meningkatnya intoleransi di antara masyarakat, khususnya kelompok muda, teralienasinya kelompok muda dari target dan sasaran kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya kekuatan aktor non negara dalam tata kelola masyarakat akan menjadi topik yang dibahas dalam panel-panel diskusi terpisah. Forum ini diharapkan dapat merumuskan resolusi dan rekomendasi yang mencerminkan keprihatinan kelompok muda, dan akan diserahkan kepada lembaga negara terkait. Selain itu, forum juga merupakan konsolidasi awal topik-topik yang diusulkan menjadi fokus pada konferensi warisan otoritarian III tahun 2010.



Keseluruhan topic-topik tersebut akan dibahas dalam beberapa kelompok panel, yakni:

1. Hak Asasi Manusia dan Politik, yang akan dikelola bersama dengan Demos;
  2. Institusionalisasi Akuntabilitas Pelanggaran HAM
  3. Tanggungjawab Korporasi Dalam Pelanggaran HAM, yang akan dikelola ELSAM, Sawit Watch, Walhi dan Huma.
- 
3. Pentas seni Budaya  
Pentas ini diorganisir sebagai penutup dari rangkaian kegiatan untuk memperingati hari HAM. Melalui kegiatan ini, dapat akan dilakukan promosi hak asasi pada kelompok muda melalui baik music, penyebaran bahan-bahan kampanye dan leaflet, dan mobilisasi dukungan atas permasalahan hak asasi yang tengah ditangani ELSAM, khususnya dukungan untuk menciptakan ruang keberagaman melalui hak asasi.

### **3. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menghadirkan perbincangan hak asasi manusia di kelompok muda;
2. Memperkenalkan dan mendiskusikan masalah-masalah hak asasi manusia yang penting seperti pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran hak eksoab dan lainnya dengan kelompok muda.
3. Memperoleh pandangan dan masukan dari kelompok muda mengenai agenda dan rekomendasi langkah tindak pemajuan hak asasi manusia.
4. Memasukkan agenda perbaikan mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi dan pembentukan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dalam agenda strategis pemajuan HAM masyarakat sipil lima tahun mendatang.
5. Menggalang dukungan politik bagi penegakan HAM di Indonesia

### **5. Waktu Kegiatan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 1 - 12 Desember 2009